

# **BELENGGU DI BALIK LAYAR**

**Menyingkap Wajah Baru Perbudakan  
di Era Peradaban Digital**



**Dr. Dharma Leksana, M.Th., M.Si.**

# **BELENGGU DI BALIK LAYAR**

**Menyingkap Wajah Baru  
Perbudakan di Era Peradaban  
Digital**

*Penulis :*

**Dr. Dharma Leksana, M.Th., M.Si.  
Tahun 2025**



*Penerbit:*

PT. DHARMA LEKSANA MEDIA GROUP

SK-KUMHAM NOMOR AHU-0072639.AH.01.01.TAHUN 2022

NPWP: 61.286.378.7-025.000

**Hak Cipta © 2025 oleh Dr. Dharma Leksana, M.Th., M.Si**

Semua hak dilindungi undang-undang.

**Judul:** *BELENGGU DI BALIK LAYAR: Menyingkap Wajah Baru  
Perbudakan di Era Peradaban Digital*

**Penulis:** Dr. Dharma Leksana, M.Th., M.Si.

**Penerbit:** PT. DHARMA LEKSANA MEDIA GROUP

**Kota Terbit:** Jakarta

**Tahun Terbit:** 2025

**ISBN:** (Sedang diajukan)

**Desain & Layout:** Tim PWGI Creative Studio

**Kata Pengantar:** Dr. Dharma Leksana, M.Th., M.Si.

**Dicetak di Indonesia**

Edisi Pertama, 02 Desember Tahun 2025

Website : <https://teologi.digital>

*Dilarang memperbanyak atau menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali untuk keperluan pendidikan dan penelitian dengan menyebutkan sumber.*

# **PENGANTAR**

## **Kemerdekaan yang Semu**

### **Latar Belakang: Mengapa 2 Desember masih relevan hari ini?**

Persepsi umum seringkali menempatkan perbudakan sebagai bagian kelam dari sejarah masa lalu—gambaran tentang kapal budak, rantai besi, dan perkebunan kolonial. Namun, pada abad ke-21 yang serba digital, realitas perbudakan tidak hilang; ia bermetamorfosis menjadi bentuk yang lebih tersembunyi dan sistemik. Relevansi tanggal 2 Desember sebagai Hari Penghapusan Perbudakan Internasional menjadi krusial dalam konteks ini.<sup>1</sup>

Peringatan global ini menandai tanggal penting ketika Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi tentang Pemberantasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Prostitusi pada 2 Desember 1949.<sup>1</sup> Pada tahun 1995, PBB secara resmi menetapkan peringatan ini, dengan fokus utama kini bergeser dari perbudakan klasik ke bentuk-bentuk kontemporer. Bentuk-bentuk perbudakan modern

yang disoroti meliputi perdagangan manusia, eksploitasi seksual, pekerja anak dalam kondisi terburuk, perkawinan paksa, dan perekrutan anak dalam konflik bersenjata.<sup>1</sup> Ironisnya, di era di mana konektivitas dan informasi seharusnya menjadi pembebas, praktik-praktik eksploitasi ini semakin dimediasi dan dipercepat oleh teknologi digital. Kita disajikan dengan kontras yang mencolok: perbudakan tidak lagi harus terjadi di laut lepas atau perkebunan, melainkan dapat terjadi di kantor-kantor ber-AC yang ternyata adalah markas *scam center* yang mengurung korban *trafficking*.<sup>3</sup>

## **Paradoks Dunia Modern: Semakin terkoneksi, semakin rentan tereksplorasi.**

Dunia modern dibangun di atas janji konektivitas, akses informasi, dan efisiensi. Teknologi digital diperkenalkan sebagai alat yang mendemokratisasi pengetahuan dan membebaskan individu dari batasan geografis. Namun, dalam prosesnya, muncul paradoks yang menyakitkan: semakin kita bergantung pada ekosistem digital, semakin besar pula kerentanan kita terhadap eksploitasi yang baru.

Para analis melihat keretakan fundamental dalam kehidupan ekonomi dan sosial saat ini yang sebanding dengan Revolusi Industri, tetapi kali ini yang dirampas

adalah kendali masyarakat atas data yang terkait dengan kehidupan mereka.<sup>5</sup> Raksasa teknologi telah mengubah data perilaku kita—waktu kita, perhatian kita, bahkan pilihan kita—menjadi aset yang dapat diekstraksi dan diperdagangkan. Sebagaimana yang dikemukakan dalam kritik terhadap model bisnis ini, perbudakan modern yang paling halus merampas "sifat manusia" itu sendiri, mengikis otonomi dan interioritas kita untuk proyek pasar abad berikutnya.<sup>5</sup> Kemerdekaan yang kita nikmati di ruang digital seringkali hanyalah kemerdekaan yang semu, di mana rantai belenggu telah berganti dari baja fisik menjadi kode algoritma yang tak terlihat.

## **Tujuan Buku: Sebuah peta jalan untuk memahami dan melawan perbudakan digital.**

Buku ini bertujuan untuk menjadi peta jalan yang menguraikan kompleksitas perbudakan di era digital. Tesis sentral yang diusung adalah bahwa eksploitasi digital bukan sekadar insiden kriminal sporadis yang dilakukan oleh *hacker* individual. Sebaliknya, ini adalah *dosa struktural* dan *ketidakadilan sistemik* yang telah terintegrasi dalam model bisnis, desain algoritma, dan celah regulasi global. Dengan membedah fondasi teoritis pergeseran dominasi, menyingkap wajah-wajah konkret

eksploitasi (mulai dari kerja paksa siber hingga komodifikasi data), dan menawarkan kerangka etis-teologis untuk perlawanan, laporan ini menyerukan pemahaman kritis dan aksi kolektif. Tujuannya adalah membantu masyarakat umum untuk memahami bahaya yang tak terlihat dan bagaimana melawan sistem yang berupaya mereduksi manusia menjadi produk.

# ABSTRAK

Buku ini mengungkap transformasi perbudakan di era peradaban digital, ketika rantai besi telah berganti menjadi jaringan kode, algoritma, dan kontrol tak kasatmata. Perbudakan modern tidak lagi berbentuk kepemilikan fisik terhadap manusia, tetapi hadir melalui kerja paksa siber, eksploitasi seksual daring, perdagangan manusia berbasis digital, gig economy yang eksploitatif, serta model bisnis kapitalisme pengawasan yang menjadikan data perilaku sebagai komoditas ekonomi. Dengan menelusuri dinamika ruang siber, sifat teknologi yang tidak netral, serta paradoks kemerdekaan digital, buku ini menunjukkan bagaimana manusia semakin rentan terhadap eksploitasi di tengah janji kemajuan teknologi.

Melalui kajian multidisiplin—mencakup teologi digital, analisis sosial, psikologi korban, studi media, hingga kritik ekonomi-politik—buku ini memetakan struktur dan mekanisme jerat yang membuat korban sulit keluar dari belenggu digital, mulai dari manipulasi psikologis, jebakan pinjol ilegal, hingga celah regulasi lintas negara. Refleksi teologis mengenai Imago Dei dan martabat manusia menawarkan kerangka spiritual dan etis untuk memahami dehumanisasi yang terjadi, sementara bagian akhir buku menyajikan manifesto pembebasan melalui etika baru teknologi, peran regulator, komunitas iman



sebagai ruang aman, dan langkah literasi digital yang dapat dilakukan oleh masyarakat.

Buku ini menjadi seruan moral dan intelektual untuk membangun ekosistem digital yang bermartabat, adil, dan manusiawi. Dengan menyoroti bahaya yang tersembunyi di balik layar, karya ini mengajak pembaca untuk tidak sekadar memahami lanskap perbudakan digital, tetapi juga terlibat aktif dalam perjuangan kolektif melawan segala bentuk ketidakbebasan yang bermetamorfosis di era teknologi.

# **DAFTAR ISI**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN HAK CIPTA**

**KATA PENGANTAR**

**Kemerdekaan yang Semu**

## **BAGIAN I**

**LANSEKAP BARU KETIDAKBEBASAN**

### **Bab 1. Metamorfosis Rantai: Dari Fisik ke Siber**

1. Sejarah Singkat Konvensi PBB 1949
2. Ilusi Kebebasan di Abad ke-21
3. Invisibilitas: Belenggu yang Tersembunyi
4. Pergeseran Paradigma: Dari Tubuh ke Data
5. Tabel Komparatif: Perbudakan Klasik vs Belenggu Digital

### **Bab 2. Selamat Datang di Peradaban Digital**

1. Definisi Peradaban Digital sebagai Ekosistem Baru
2. Cyberspace: Ruang Tanpa Batas dan Anonimitas
3. Teknologi: Pembebas atau Penindas
4. Teknologi Tidak Netral: Nilai dan Kuasa dalam Algoritma
5. Implikasi Etis dari Ekspansi Teknologi

## **BAGIAN II**

### **WAJAH–WAJAH PERBUDAKAN DIGITAL**

#### **Bab 3. Kerja Paksa di Balik Kilau Startup (The Labour Trap)**

1. Scam Centers Internasional
2. Buruh Mikro Digital dalam Ekosistem AI
3. Gig Economy dan Eksploitasi Algoritmik
4. Analisis Kerentanan Ekonomi Pekerja Digital

#### **Bab 4. Komodifikasi Tubuh dan Martabat**

1. Perdagangan Manusia 2.0 di Media Sosial
2. Eksploitasi Seksual Daring (OSEC & Webcam Slavery)
3. Fenomena Sextortion dan Penyanderaan Psikologis
4. Tubuh sebagai Komoditas di Pasar Gelap Digital

#### **Bab 5. Perbudakan Data (Data Slavery)**

1. Panoptikon Digital dan Hilangnya Privasi
2. Kapitalisme Pengawasan (Surveillance Capitalism)
3. Algoritmisasi Kehendak dan Ketergantungan Struktural
4. Data sebagai Sumber Daya yang Diperjualbelikan

## **BAGIAN III**

### **MANIFESTO KEMANUSIAAN DIGITAL**

#### **Bab 6. Mekanisme Jerat: Mengapa Sulit Lepas?**

1. Psikologi Korban dan Manipulasi Jarak Jauh
2. Debt Bondage dalam Modus Pinjaman Online Ilegal
3. Celah Regulasi Lintas Negara
4. Analisis Struktural Perangkat Eksploitasi

#### **Bab 7. Refleksi Teologis: Mencari Wajah Tuhan di Layar**

1. Imago Dei di Era AI
2. Konsep Kemerdekaan Sejati
3. Dosa Struktural Digital dalam Algoritma
4. Spiritualitas Perlawanan di Ruang Siber

#### **Bab 8. Jalan Pembebasan: Membangun Ekosistem Bermartabat**

1. Etika Baru Peradaban Digital
2. Tanggung Jawab Pengembang dan Regulator
3. Peran Komunitas Iman sebagai Sanctuary
4. Literasi Digital dan Aksi Publik
5. Call to Action: Mewujudkan Ekosistem Siber Berkeadilan

## **EPILOG**

Refleksi 2 Desember untuk Masa Depan

## **LAMPIRAN**

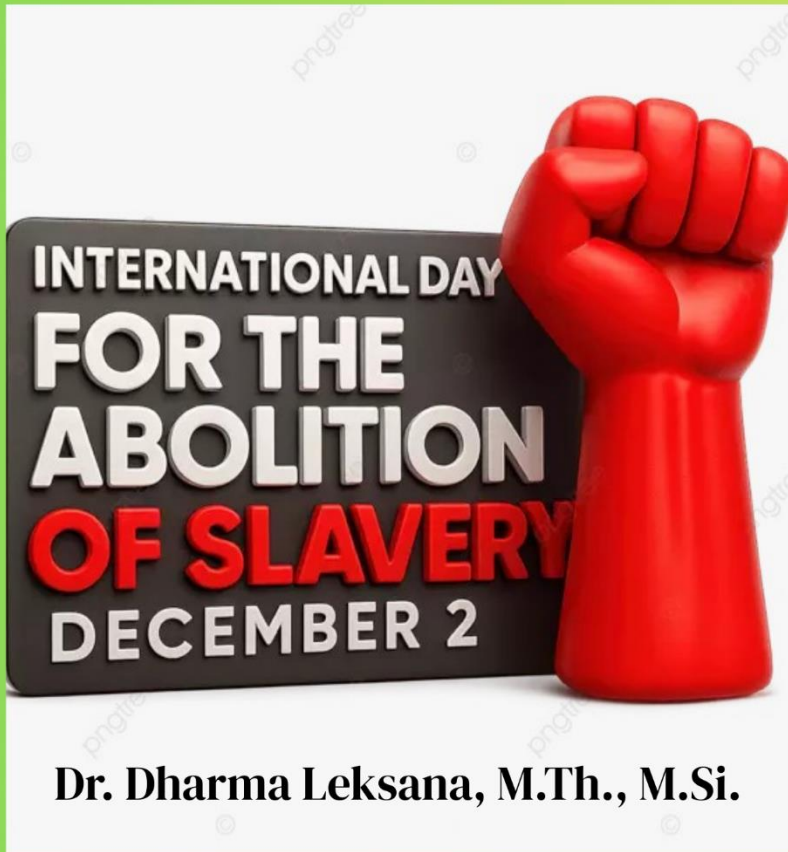
- 1. Glosarium Istilah Digital**
- 2. Panduan Keamanan Digital Praktis**
- 3. Daftar Lembaga Bantuan untuk Korban  
Kejahatan Siber/Trafficking**

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **PROFIL PENULIS**

# **BELENGGU DI BALIK LAYAR**

**Menyingkap Wajah Baru Perbudakan  
di Era Peradaban Digital**



**Dr. Dharma Leksana, M.Th., M.Si.**

# **BAGIAN I: LANSEKAP BARU KETIDAKBEBASAN**

Bagian ini meletakkan fondasi teoretis dan historis, menjelaskan bagaimana "medan perang" telah berpindah dari lautan dan perkebunan ke jaringan kabel optik.

## **BAB 1. Metamorfosis Rantai: Dari Fisik ke Siber**

**Sejarah Singkat: Kilas balik Konvensi PBB 1949 dan makna historis 2 Desember.**

Sejak lama, makna perbudakan telah berkembang. Awalnya, perbudakan dipahami sebagai kepemilikan formal atas individu. Namun, Konvensi PBB 1949, yang menjadi akar peringatan 2 Desember, bersamaan dengan penetapan resminya pada 1995, menyoroti bahwa perbudakan modern mencakup segala bentuk perampasan otonomi dan martabat, meskipun tidak ada kepemilikan formal.<sup>2</sup> Rantai fisik digantikan oleh berbagai bentuk pemaksaan dan penipuan.

## **Ilusi Kebebasan: Membantah mitos bahwa perbudakan telah musnah di abad ke-21.**

Masyarakat modern cenderung percaya bahwa perbudakan adalah sisa sejarah. Namun, kenyataannya perbudakan telah bermigrasi dan berevolusi. Perbudakan kontemporer memanfaatkan celah anonimitas dan kecepatan ruang siber, membuatnya semakin sulit dideteksi dan diberantas.<sup>2</sup> Praktik *wage slavery* (perbudakan upah) yang memaksa individu bekerja demi upah minimum tanpa jaminan, sering menjadi jembatan awal menuju eksploitasi yang lebih brutal di ranah digital.

## **Invisibilitas: Bagaimana perbudakan modern menyembunyikan dirinya di balik layar komputer dan *smartphone*.**

Salah satu tantangan terbesar perbudakan digital adalah sifatnya yang tak terlihat (*invisibilitas*). Jika perbudakan klasik terikat pada batas geografis dan mudah diidentifikasi, perbudakan modern terselubung di balik kedok pekerjaan normal. Sebagai contoh, ribuan orang yang diperdagangkan ke *scam center* di Asia Tenggara seringkali direkrut melalui iklan lowongan kerja bergaji tinggi. Mereka dipaksa melakukan kejahatan *online*,



disiksa, dan diperbudak, namun bagi dunia luar, mereka hanya tampak sebagai pegawai kantor.<sup>3</sup> Perbudakan ini dimulai sebagai penipuan (*deception*) yang menargetkan kerentanan ekonomi, bahkan korban yang terpelajar dan multilingual seringkali menjadi sasaran, karena mereka tidak melihat adanya "bendera merah" penipuan dalam proses rekrutmen.<sup>4</sup> Perbudakan ini menantang definisi hukum karena seringkali melibatkan "persetujuan" awal (kontrak kerja palsu atau pinjaman) sebelum berubah menjadi pemaksaan.

***Key Point:*** Pergeseran paradigma dari penguasaan tubuh secara fisik menjadi penguasaan akses dan data.

Pergeseran ini menandai perubahan paradigma yang mendasar. Eksploitasi tidak lagi didominasi oleh perampasan tenaga kerja fisik murni, tetapi kini berfokus pada penguasaan akses, data, dan bahkan kehendak individu. Perbandingan antara perbudakan klasik dan digital menunjukkan sejauh mana belenggu telah bertransformasi.

**Tabel Komparatif: Perbudakan Klasik vs. Belenggu Digital**

Dimensi	Perbudakan Klasik (Fisik)	Belenggu Digital (Modern)
Rantai Pengikat	Fisik (Borgol, Rantai, Batas Geografis)	Non-Fisik (Data, Utang, Algoritma, Ketergantungan Akses)
Benda yang Dieksploitasi	Tubuh, Tenaga Kerja, Tanah	Data Perilaku, Waktu, Perhatian, Trauma (Buruh Mikro Digital)
Lokasi Eksploitasi	Perkebunan, Tambang, Galangan Kapal	<i>Cyberspace</i> , Ruang Digital, <i>Scam Center</i> , Aplikasi <i>Gig</i>
Identitas Korban	Jelas Terlihat, Terisolasi Secara Sosial	Terselubung di Balik Profil Palsu atau Kontrak "Kemitraan"
Mekanisme	Kekuatan Militer,	Manipulasi Psikologis, Jerat

<b>Penyanderaan</b>	Kepemilikan Hukum	Utang Digital (Pinjol), Ancaman Penyebaran Data
---------------------	-------------------	---

Perbudakan digital memiliki spektrum yang luas, dari perampasan fisik (seperti di *scam center*) hingga perampasan hak-hak sosial-ekonomi (seperti dalam *gig economy*), namun akarnya adalah penggunaan teknologi untuk mem-*bypass* regulasi kemanusiaan dan mereduksi manusia menjadi sumber daya yang mudah diganti (*disposable*).

## **BAB 2. Selamat Datang di Peradaban Digital**

**Definisi Peradaban Digital: Bukan sekadar alat, melainkan lingkungan hidup (ekosistem) baru manusia.**

Peradaban digital melampaui sekadar penggunaan alat atau gawai. Ia adalah ekosistem, lingkungan hidup baru (*cyber space*) yang tak terpisahkan dari eksistensi manusia modern.<sup>6</sup> Semua aspek kehidupan—mulai dari ekonomi, komunikasi, hingga hubungan sosial—terjadi dalam ruang ini. Memahami perbudakan modern memerlukan pengakuan bahwa eksploitasi kini terjadi di habitat utama manusia kontemporer.

**Ruang Siber (*Cyberspace*): Memahami karakteristik ruang tanpa batas, anonimitas, dan kecepatan arus informasi.**

Ruang siber memiliki karakteristik unik yang berkontribusi pada kerentanan eksploitasi. Pertama, adanya **konektivitas global** yang tidak dibatasi oleh batas geografis. Orang-orang dapat terhubung, bertukar informasi, dan berkolaborasi lintas budaya dengan instan.<sup>7</sup> Karakteristik ini, meskipun positif, menjadi kutukan ketika dimanfaatkan oleh sindikat kejahatan siber.

Kedua, adanya **anonimitas** yang memungkinkan pelaku kejahatan siber beroperasi tanpa terhambat oleh yurisdiksi nasional.<sup>8</sup> Sindikat *trafficking* dan *scam center* dapat merekrut korban di satu negara, mengoperasikannya di negara kedua, dan menargetkan korban di negara ketiga, memanfaatkan celah regulasi antarnegara.

### **Pedang Bermata Dua: Teknologi sebagai pembebas (*enabler*) vs Teknologi sebagai penindas (*oppressor*).**

Teknologi secara inheren adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia adalah pembebas (*enabler*). Jaringan digital memungkinkan manusia untuk merespons dengan cepat terhadap ketidakadilan dan menyebarkan gagasan pembebasan ke tingkat global, seperti pengembangan teologi pembebasan digital.<sup>9</sup>

Di sisi lain, teknologi adalah penindas (*oppressor*). Ia memfasilitasi penindasan yang tersembunyi, sistematis, dan berskala masif.<sup>10</sup> Kekuatan penindasan ini didirikan di atas nilai-nilai korporat yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan dan ekstraksi data, yang tersemat dalam desain algoritma.

**Key Point:** Memahami bahwa teknologi tidak netral;

**ia membawa nilai dan potensi kuasa.**

Secara filosofis, teknologi tidak dapat dianggap netral.<sup>11</sup> Jika dilihat dari fungsi dasar mesin, ia mungkin netral, tetapi dalam relasinya yang kompleks dengan aktivitas manusia dan sistem nilai di baliknya, teknologi selalu dilekati oleh kuasa. Teknologi adalah sistem aplikasi pengetahuan yang dibentuk oleh sains dan budaya, dan pada saat yang sama membentuknya kembali menjadi *tekno-kultur*.<sup>11</sup>

Jika teknologi tidak netral, dan ruang siber tidak memiliki batas geografis<sup>7</sup>, maka nilai-nilai yang tertanam dalam teknologi (misalnya, memaksimalkan profit melalui ekstraksi data) dapat diekspor dan diterapkan secara universal tanpa hambatan regulasi lokal. Kuasa penindasan digital didirikan di atas nilai-nilai korporat ini, bukan sekadar ketidaksengajaan. Oleh karena itu, perlawanan terhadap perbudakan digital memerlukan pemeriksaan mendalam terhadap *desain* dan *etika* dari sistem teknologi itu sendiri.

## **BAGIAN II: WAJAH-WAJAH PERBUDAKAN DIGITAL**

Bagian ini mengupas tuntas bentuk-bentuk konkret eksploitasi, menjelaskan narasi kasus yang menunjukkan bagaimana belenggu digital bekerja dalam praktik.

### **BAB 3. Kerja Paksa di Balik Kilau Startup (*The Labour Trap*)**

**Industri *Scam* Internasional: Bedah kasus *scam centers* (seperti di Kamboja/Myanmar) yang merekrut korban dengan iklan lowongan kerja palsu.**

Salah satu bentuk perbudakan digital yang paling brutal adalah *scam center* atau "ladang penipuan" yang tersebar di Asia Tenggara, terutama di Kamboja dan Myanmar. Laporan investigasi menunjukkan bahwa ratusan ribu orang, termasuk WNI, diperdagangkan ke kompleks penipuan *online*.<sup>4</sup> Mereka direkrut dengan janji gaji tinggi atau pekerjaan bergengsi di luar negeri.<sup>4</sup> Setelah tiba, mereka dipaksa melakukan penipuan *online* (seperti penipuan *crypto* atau *romance scam*) di bawah ancaman perbudakan, penyiksaan, dan penahanan.<sup>3</sup> Kasus-kasus ini

diklasifikasikan sebagai krisis hak asasi manusia di mana sindikat kejahatan terorganisir memanfaatkan platform rekrutmen *online* untuk menjebak korban, bahkan yang berpendidikan tinggi dan multibahasa.<sup>4</sup>

### **Buruh Mikro Digital: Eksploitasi di balik pelabelan data AI dan moderasi konten media sosial.**

Di balik janji manis kecerdasan buatan (AI) terdapat lapisan buruh digital yang tak terlihat, sering disebut "buruh mikro". Pekerja ini bertanggung jawab untuk melabeli data, memverifikasi gambar, atau memoderasi konten media sosial.<sup>12</sup> Meskipun mereka dianggap sebagai tulang punggung efisiensi AI, mereka sering kali bekerja dalam kondisi upah rendah, rentan terhadap trauma psikologis karena paparan konten yang mengerikan, dan hampir tidak memiliki pengakuan hak sebagai pekerja. Pekerjaan ini mereduksi kontribusi manusia menjadi tugas digital berulang yang sangat tidak manusiawi, sehingga meskipun mereka bebas bergerak secara fisik, mereka mengalami dehumanisasi mendalam.



***Gig Economy & Algoritma: Bagaimana aplikasi "memaksa" pengemudi/kurir bekerja melampaui batas manusiawi tanpa jaminan sosial.***

Fenomena *gig economy* yang tumbuh pesat di Indonesia menawarkan model pekerjaan yang fleksibel dan mandiri, menggunakan platform digital untuk menghubungkan konsumen dan pekerja *gig*.<sup>13</sup> Namun, sisi gelapnya terletak pada kerangka hubungan kerja yang tidak jelas. Pekerja seperti pengemudi ojek *online* atau kurir sering disebut "mitra".<sup>14</sup> Penggunaan istilah "mitra" ini membebaskan perusahaan platform dari kewajiban menyediakan hak-hak tenaga kerja standar, seperti membayar upah minimum, pesangon, atau BPJS Ketenagakerjaan.<sup>14</sup>

Algoritma bertindak sebagai manajer mikro yang tak terlihat, mendikte tarif, memantau kinerja, dan memberlakukan sanksi. Mekanisme ini secara efektif "memaksa" pekerja untuk bekerja dalam jam yang melampaui batas manusiawi demi memenuhi target dan menanggapi permintaan, namun tanpa jaminan sosial yang layak. Eksploitasi dalam *gig economy* adalah bentuk perbudakan yang menjebak pekerja secara ekonomi dan hukum, merampas hak-hak sosial-ekonomi mereka melalui mekanisme digital.

***Key Point:*** Mengungkap sisi gelap ekonomi digital yang sering kali tidak manusiawi.

Ketiga kasus di atas—*scam center*, buruh mikro digital, dan *gig economy*—mengungkap bahwa perbudakan digital memanfaatkan kecepatan dan *disposability* tenaga kerja. Akar masalahnya sama: penggunaan teknologi canggih untuk mem-*bypass* regulasi dan norma kemanusiaan yang ada.

## **BAB 4. Komodifikasi Tubuh dan Martabat**

### **Perdagangan Manusia 2.0: Modus rekrutmen sindikat *trafficking* melalui media sosial dan aplikasi kencan.**

Platform digital telah menjadi alat yang efisien bagi sindikat perdagangan manusia. Media sosial dan aplikasi kencan digunakan untuk menjaring korban dengan menyamar sebagai peluang kerja, janji asmara, atau tawaran bantuan. Anonimitas dan kemampuan untuk menargetkan korban yang spesifik memungkinkan pelaku *trafficking* beroperasi dengan jangkauan global.

### **Eksplorasi Seksual Daring: Fenomena OSEC (*Online Sexual Exploitation of Children*), *webcam slavery*, dan *live streaming* paksa.**

Digitalisasi kekerasan seksual menciptakan bentuk eksploitasi yang *scalable* dan *transnasional*. Salah satu bentuk yang paling mengerikan adalah OSEC (*Online Sexual Exploitation of Children*), di mana anak-anak menjadi korban eksploitasi seksual yang direkam dan

disiarkan secara *livestream* kepada audiens global.<sup>15</sup>

Selain itu, terdapat pula *webcam slavery*. Dalam industri *webcam* dewasa, model sering melaporkan penyalahgunaan oleh studio yang memproduksi konten. Korban dipaksa bekerja dalam *shift* 18 jam, dalam kondisi tidak higienis, dan dipaksa melakukan tindakan non-konsensual, yang dianggap merendahkan atau menyakitkan.<sup>16</sup> Dalam banyak kasus, mereka tidak pernah melihat atau menandatangani ketentuan layanan platform, yang memudahkan studio melakukan pencurian upah dan eksploitasi.

### ***Sextortion*: Pemerasan berbasis konten seksual sebagai alat penyanderaan mental.**

*Sextortion*, gabungan dari 'sexual' dan 'extortion', adalah bentuk pemerasan yang melibatkan ancaman penyebaran konten seksual pribadi korban jika tuntutan pelaku (baik berupa uang atau tuntutan seksual lain) tidak dipenuhi.<sup>17</sup> Modus ini bisa berawal dari hubungan konsensual yang disalahgunakan, *catfishing* (identitas palsu), atau peretasan data.<sup>17</sup>

Meskipun kasus *sextortion* sangat marak di Indonesia, perlindungan hukumnya masih belum maksimal di bawah

UU ITE atau UU TPKS, karena aturan yang ada belum mampu menjadi landasan hukum yang kuat untuk melindungi korban secara memadai.<sup>17</sup> Digitalisasi kekerasan seksual menghilangkan jarak fisik antara pelaku dan korban, tetapi menciptakan kebutuhan mendesak untuk redefinisi alat bukti dan yurisdiksi dalam hukum pidana.

***Key Point:*** Tubuh manusia yang dijadikan objek transaksi di pasar gelap digital.

Intinya adalah tubuh dan martabat manusia telah dijadikan objek transaksi di pasar gelap digital. Trauma fisik dan psikologis diderita oleh korban, namun bukti kejahatan tersebut seringkali hanya berupa data digital, menyulitkan penegakan hukum tradisional.

## **BAB 5. Perbudakan Data (*Data Slavery*)**

**Panoptikon Digital: Konsep pengawasan menyeluruh (*surveillance*) di mana privasi menjadi barang mewah.**

Konsep Panoptikon, yang awalnya diutarakan oleh Jeremy Bentham dan dikembangkan oleh Michel Foucault, merujuk pada mekanisme pengawasan di mana individu merasa diawasi secara terus-menerus, meskipun pengawasnya mungkin tidak terlihat. Di era digital, Panoptikon ini telah diperluas menjadi *super panopticon* yang terintegrasi dan tak kasatmata.<sup>19</sup> Melalui perangkat lunak dan layanan, individu diawasi secara menyeluruh (*surveillance*), memungkinkan pengumpulan data secara masif untuk regulasi, kontrol, dan manipulasi perilaku. Di Panoptikon Digital, privasi telah menjadi barang mewah.

**Manusia sebagai Produk: Kritik terhadap model bisnis raksasa teknologi (merujuk pada Shoshana Zuboff).**

Analisis mendalam terhadap kapitalisme pengawasan

(*Surveillance Capitalism*), seperti yang dijelaskan oleh Shoshana Zuboff, menempatkan perbudakan data sebagai bentuk dominasi baru. Model bisnis ini beroperasi dengan *ekstraksi* data perilaku surplus—data yang awalnya tidak dimaksudkan untuk dieksploitasi—untuk menghasilkan *prediksi* perilaku masa depan.<sup>5</sup> Prediksi inilah yang kemudian dijual kepada pihak ketiga.

Zuboff berargumen bahwa kapitalisme pengawasan merupakan "perampasan" (*dispossession*) yang skalanya sebanding dengan Revolusi Industri.<sup>5</sup> Namun, kali ini yang dirampas adalah "sifat manusia" itu sendiri, yaitu otonomi individu atas pilihan dan perilaku hidup mereka. Masalahnya bukan hanya kebocoran data; masalahnya adalah hilangnya kendali atas ekspresi diri di ruang digital, di mana data perilaku kita dikomodifikasi dan digunakan untuk memanipulasi kita.<sup>5</sup>

**Ketergantungan Struktural: Ketika manusia tidak lagi memiliki otonomi atas pilihan dan perilakunya sendiri karena didikte algoritma.**

Perbudakan data adalah bentuk penjajahan yang paling halus karena ia merampas *kehendak* dan *otonomi kognitif*. Algoritma tidak hanya merekomendasikan produk, tetapi juga secara aktif membentuk kebiasaan, konsumsi, dan

bahkan pandangan politik kita, menciptakan ketergantungan struktural.<sup>22</sup> Pilihan yang kita buat terasa bebas, tetapi pada kenyataannya, telah diarahkan dan dimanipulasi oleh kepentingan korporasi yang tersemat dalam kode. Ini adalah dominasi yang menciptakan kerugian psikologis dan memperkuat posisi dominan pelaku pasar.<sup>5</sup>

***Key Point:*** Bentuk perbudakan paling halus di mana pikiran dan kebiasaan kita "dijajah" tanpa disadari.

Memerangi perbudakan data berarti memperjuangkan kedaulatan kognitif. Masalah ini diperparah oleh kerangka hukum dan regulasi yang seringkali tertinggal dalam mengikuti laju perkembangan teknologi, menciptakan celah bagi eksploitasi data pribadi demi kepentingan pihak tertentu.<sup>21</sup>



## **BAGIAN III: MANIFESTO KEMANUSIAAN DIGITAL**

Bagian ini menyajikan inti etika dan solusi, mengembangkan refleksi mengenai Teologi Digital dan peta jalan menuju masa depan yang lebih bermartabat.

### **BAB 6. Mekanisme Jerat: Mengapa Sulit Lepas?**

**Psikologi Korban: Analisis ketakutan, isolasi, dan manipulasi psikologis jarak jauh.**

Mekanisme yang menjebak korban dalam perbudakan digital bersifat kompleks dan psikologis. Kejahatan siber sangat bergantung pada faktor manusia, di mana kerentanan psikologis, motivasi individu, dan interaksi sosial menentukan keberhasilan serangan.<sup>23</sup> Pelaku menggunakan ancaman, pelecehan, dan penyebaran informasi pribadi melalui *cyberstalking* untuk menakut-nakuti atau mengendalikan korban dari jarak jauh.<sup>24</sup> Manipulasi ini menciptakan isolasi dan ketakutan yang

mendalam, membuat korban kesulitan mencari bantuan atau melarikan diri dari sistem eksploitasi.

### **Jebakan Utang Digital (*Debt Bondage*): Peran pinjaman *online* ilegal (Pinjol) sebagai rantai modern.**

Pinjaman *online* (*Peer-to-Peer Lending*) telah menjadi sangat populer karena kemudahan dan kecepatannya.<sup>25</sup> Namun, maraknya Pinjol ilegal—aplikasi yang beroperasi tanpa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)—berfungsi sebagai rantai modern.<sup>25</sup> Pinjol ilegal sering kali menutupi informasi perusahaan<sup>25</sup> dan menggunakan data pribadi yang diperoleh (secara sah atau dengan meretas) sebagai alat ancaman dan pemerasan. Dengan bunga mencekik dan taktik penagihan yang brutal (*cyberstalking*), Pinjol ilegal menjebak individu dalam siklus utang dan penyanderaan yang mirip dengan *debt bondage* historis. Konvergensi antara ekstraksi data ilegal dan pemaksaan finansial inilah yang mengunci korban dalam sistem eksploitasi.

### **Hukum yang Tertinggal: Celah regulasi lintas negara yang dimanfaatkan pelaku kejahatan siber.**

Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum untuk

kejahatan siber, termasuk UU ITE dan UU TPKS<sup>27</sup>, penegakan hukum menghadapi tantangan besar karena celah regulasi lintas negara. Kejahatan siber bersifat lintas batas, yang sangat menyulitkan yurisdiksi nasional untuk menangkap dan mengadili pelaku yang sering beroperasi dari luar negeri.<sup>8</sup>

Para pelaku memanfaatkan fakta bahwa kerangka hukum sering tertinggal dari laju teknologi.<sup>21</sup> Komisi hak asasi manusia PBB menegaskan bahwa pemerintah perlu mengatur cara perusahaan swasta menangani data pribadi untuk menghormati hak privasi.<sup>8</sup> Negara wajib bertindak sebagai penyeimbang yang kuat terhadap ancaman kapitalisme pengawasan dan menuntut akuntabilitas dari perusahaan teknologi.<sup>5</sup>

***Key Point:* Mengurai benang kusut yang membuat korban terkunci dalam sistem eksploitasi.**

Jerat perbudakan digital adalah benang kusut yang menggabungkan kegagalan finansial (Pinjol), manipulasi psikologis, dan celah hukum. Untuk pembebasan, diperlukan intervensi di tiga tingkatan ini: penegakan hukum yang harmonis secara internasional, perlindungan data pribadi yang ketat, dan dukungan psikologis bagi korban.

## **BAB 7. Refleksi Teologis: Mencari Wajah Tuhan di Layar**

***Imago Dei* di Era AI: Menegaskan kembali bahwa manusia (dunia nyata maupun digital) adalah Gambar Allah yang memiliki martabat tak tertawar.**

Dalam era di mana kecerdasan buatan dapat meniru banyak fungsi manusia—mulai dari menulis puisi hingga membuat keputusan berbasis etika—muncul pertanyaan mendasar tentang apa yang membuat kita manusia dan di mana letak martabat kita.<sup>28</sup> Analisis teologis menegaskan bahwa martabat manusia bersumber dari konsep *Imago Dei* (Gambar Allah), yang tidak didasarkan pada *fungsi* (kecerdasan atau efisiensi) melainkan pada *relasi* dan *eksistensi*.<sup>28</sup>

Ketika sistem digital (seperti kapitalisme pengawasan) berupaya mereduksi manusia menjadi data atau produk yang dapat dioptimalkan, hal itu secara fundamental melanggar martabat ilahi yang tak tertawar.<sup>28</sup> Nilai manusia bukanlah apa yang mereka hasilkan atau seberapa cerdas mereka, tetapi kemampuan mereka untuk mencintai, berbelas kasih, dan mempertahankan otonomi kehendak.

**Kemerdekaan Sejati: Definisi teologis tentang kebebasan—bebas dari dominasi, bebas untuk menjadi manusia utuh.**

Dari perspektif teologis, kemerdekaan sejati (*freedom*) tidak berarti bebas tanpa batas (*license*) atau bertindak sewenang-wenang.<sup>30</sup> Kemerdekaan sejati adalah pembebasan dari segala bentuk penghambaan—baik penghambaan terhadap dosa, hawa nafsu, maupun sistem yang tidak adil—agar individu dapat hidup dalam ketaatan yang bertanggung jawab.<sup>31</sup>

Dalam konteks digital, kemerdekaan sejati berarti bebas dari dominasi algoritma yang mendikte pilihan, dan bebas dari paksaan kejahatan siber. Ia adalah perjuangan untuk mempertahankan hak asasi Allah di dalam diri manusia, agar aktualisasi kemanusiaan tidak terdisrupsi oleh praktik digital yang adaptif.<sup>30</sup>

### **Dosa Struktural Digital: Melihat sistem algoritma yang tidak adil sebagai bentuk dosa sosial yang harus dikritisi.**

Teologi memandang ketidakadilan yang sistematis sebagai "dosa struktural" atau "dosa sosial." Ketika algoritma dirancang untuk secara inheren mengeksploitasi pekerja, memisahkan keluarga (melalui *trafficking*), atau menghilangkan hak-hak sosial-ekonomi

pekerja (*gig economy*), maka sistem tersebut adalah manifestasi dari dosa sosial yang harus dikritisi secara profetik. Perlawanan terhadap perbudakan digital harus bersifat moral-eksistensial, menuntut restrukturisasi model bisnis yang secara fundamental tidak adil.

***Key Point:* Landasan spiritual bagi perlawanan terhadap dehumanisasi digital.**

Landasan spiritual ini memindahkan perdebatan dari ranah legal-teknis yang sering kaku ke ranah moral. Jika martabat manusia adalah suci, maka setiap sistem digital yang mengubah manusia menjadi *objek transaksional* adalah sebuah tindakan yang melanggar.

## **BAB 8. Jalan Pembebasan: Membangun Ekosistem Bermartabat**

**Etika Baru Peradaban Digital: Prinsip-prinsip moral yang harus dipegang oleh pengguna, pengembang, dan regulator.**

Jalan menuju pembebasan memerlukan kerangka etika baru yang mengikat semua pihak dalam ekosistem digital. Etika Komputer, yang fokus pada isu moral terkait penggunaan dan pengembangan teknologi, menekankan bahwa etika bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban moral.<sup>32</sup>

1. **Tanggung Jawab Pengembang:** Pengembang teknologi berada di garis depan keputusan moral.<sup>33</sup> Mereka harus menginternalisasi prinsip: **Menghindari Kerugian** (*Avoid Harm*)<sup>32</sup>, **Transparansi Algoritma** (pengguna berhak tahu bagaimana keputusan memengaruhi mereka), **Keadilan** (memastikan AI tidak memperkuat bias sosial), dan **Akuntabilitas** atas produk yang dibuat.<sup>33</sup>
2. **Peran Regulator:** Regulator harus menciptakan panduan etik global (*Global Code of Conduct*) dan peraturan lintas batas. Negara harus berdiri sebagai

penyeimbang kuat, menjunjung tinggi kesejahteraan dan otonomi manusia di hadapan ancaman kapitalisme pengawasan.<sup>5</sup>

**Peran Komunitas Iman: Bagaimana Gereja dan lembaga agama bisa menjadi *sanctuary* (ruang aman) dan advokat bagi korban.**

Komunitas iman dan lembaga agama memiliki peran penting dalam perjuangan melawan perbudakan digital. Mereka dapat menjadi *sanctuary* (ruang aman) yang menyediakan perlindungan, dukungan kesehatan mental<sup>34</sup>, dan pemulihan bagi korban kejahatan siber dan *trafficking*. Lembaga-lembaga ini juga harus bertindak sebagai advokat, bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum, seperti LBH APIK, untuk meningkatkan akses keadilan bagi korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE).<sup>35</sup>

**Literasi & Aksi: Langkah praktis bagi pembaca untuk melindungi diri dan sesama.**

Perlindungan digital bukan hanya tanggung jawab struktural, tetapi juga kolektif. Pembaca harus dibekali dengan literasi kritis terhadap manipulasi algoritma dan



langkah-langkah *cyber resilience*. Hal ini mencakup pemeriksaan jejak digital secara rutin, memisahkan data penting/vital dari data publik, dan waspada terhadap informasi yang bocor.<sup>36</sup>

***Key Point: Ajakan bertindak (Call to Action) untuk menciptakan ruang siber yang berkeadilan.***

Memerangi belenggu digital memerlukan aliansi antara teknokrat, teolog, aktivis HAM, dan legislator. Ini adalah ajakan untuk menciptakan ekosistem bermartabat di mana teknologi berfungsi untuk memperkuat kemanusiaan, bukan sekadar mengejar keuntungan ekonomi.<sup>33</sup>

# EPILOG

## Refleksi 2 Desember untuk Masa Depan

Refleksi atas Hari Penghapusan Perbudakan Internasional pada 2 Desember menegaskan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan belum berakhir; ia hanya berpindah medan perang. Di era peradaban digital, belenggu tidak lagi berbunyi gemerincing, tetapi berdesir melalui jaringan kabel optik dan kode algoritma. Kemerdekaan sejati di masa depan adalah kemampuan untuk mempertahankan *Imago Dei* dan otonomi kognitif kita di hadapan kekuasaan data dan dominasi struktural. Kita harus bergerak melampaui kepasrahan teknologi menuju aktivisme digital yang profetik.

# LAMPIRAN

## Daftar Istilah Digital (Glosarium)

- ***Surveillance Capitalism (Kapitalisme Pengawasan):*** Model bisnis yang didasarkan pada ekstraksi data perilaku surplus individu untuk menghasilkan prediksi perilaku masa depan yang dijual sebagai produk di pasar.<sup>5</sup>
- ***Panoptikon Digital:*** Konsep pengawasan menyeluruh yang terintegrasi dan tak kasatmata di ruang siber, di mana individu merasa selalu diawasi, sehingga menghasilkan disiplin diri dan kontrol perilaku.<sup>19</sup>
- ***Sextortion:*** Gabungan dari pemerasan seksual (*sexual extortion*), yaitu ancaman untuk menyebarkan konten seksual privat korban demi memeras uang atau tuntutan seksual lainnya.<sup>17</sup>
- ***Gig Economy:*** Model pekerjaan sementara, mandiri, dan fleksibel dengan memanfaatkan platform digital, seringkali mengaburkan hubungan kerja formal menjadi "kemitraan" untuk menghindari kewajiban jaminan sosial.<sup>13</sup>
- ***Imago Dei:*** Konsep teologis yang menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut Gambar Allah, memberikan martabat yang tak tertawar, independen dari fungsi, kemampuan, atau utilitas ekonomi.<sup>28</sup>
- ***PII (Personally Identifiable Information):*** Informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang (misalnya alamat email, nomor telepon, sandi akun).<sup>36</sup>

## Panduan Keamanan Digital Praktis

1. **Cek Jejak Digital:** Lakukan pencarian nama Anda di mesin pencari. Semakin banyak informasi pribadi yang mudah ditemukan, semakin tinggi tingkat kerentanan.<sup>36</sup>
2. **Klasifikasi Data:** Kategorikan data Anda menjadi Vital (sangat sensitif, seperti PIN/sandi), Pribadi (potensi kerusakan jika bocor, seperti alamat), dan Publik.<sup>36</sup>
3. **Pisahkan Akun:** Gunakan nomor ponsel dan alamat email yang terpisah untuk pekerjaan/akun publik dan untuk data pribadi/vital.
4. **Perlindungan Data:** Pastikan pengaturan keamanan dan privasi di media sosial telah dikonfigurasi dengan ketat. Aktifkan *Two-Factor Authentication* (2FA).
5. **Periksa Kebocoran Data:** Secara rutin, periksa apakah alamat email atau data pribadi Anda pernah masuk daftar PII yang bocor melalui layanan seperti *haveibeenpwned.com*.<sup>36</sup>
6. **Perlindungan Fisik Perangkat:** Pastikan perangkat fisik (ponsel, laptop) memiliki perlindungan digital dan fisik yang kuat untuk mencegah perampasan paksa.<sup>37</sup>

## Daftar Lembaga Bantuan untuk Korban Kejahatan Siber/Trafficking

Korban perbudakan digital harus tahu ke mana harus mencari bantuan dan perlindungan.

- **Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK):** Menyediakan perlindungan bagi saksi, korban, dan pelapor kejahatan.<sup>38</sup>
- **IOM Indonesia (Organisasi Internasional untuk Migrasi):** Mendukung pemulangan korban perdagangan orang, khususnya di sektor *online scam* dan *trafficking*.<sup>39</sup>
- **LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum):** Organisasi yang fokus pada advokasi dan bantuan hukum bagi korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE).<sup>35</sup>
- **Pemerintah (Kementerian PPA):** Menyediakan layanan rujukan akhir dan dukungan kesehatan mental bagi Perempuan Korban Kekerasan.<sup>34</sup>
- **Otoritas Jasa Keuangan (OJK):** Menyediakan informasi dan satgas penanganan keuangan ilegal, termasuk penutupan Pinjol ilegal.<sup>26</sup>

## Daftar Pustaka

- Amnesty International Indonesia. *Laporan Ungkap Perdagangan Manusia, Perbudakan, dan Penyiksaan di Kompleks Penipuan Online di Kamboja*. (Dikutip dari laporan dan siaran pers terkait).<sup>3</sup>
- Human Rights Watch (HRW). *Laporan tentang Pelanggaran Tenaga Kerja dan Eksploitasi Seksual di Studio Webcam*. (Dikutip dari laporan terkait).<sup>16</sup>
- International Justice Mission (IJM). *Scale of Harm: Estimating the Prevalence of Trafficking to Produce Child Sexual Exploitation Material*. (Dikutip dari laporan OSEC terkait).<sup>15</sup>
- Pulitzer Center. *Analisis Bagaimana Hype AI Memperdalam Eksploitasi Tenaga Kerja*. (Dikutip dari artikel terkait AI Accountability Network).<sup>12</sup>
- Sulianta, Feri. *Dasar dan Konsep Computer Ethics*. (Dikutip dari buku terkait Etika Komputer).<sup>32</sup>
- United Nations General Assembly. *Konvensi tentang Pemberantasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Prostitusi*. 2 Desember 1949.<sup>1</sup>
- Yusuf, Iwan Awaluddin. “Mendiskusikan Netralitas Teknologi.” (Dikutip dari Bincang Media).<sup>11</sup>
- Zuboff, Shoshana. *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. (Dikutip dari tinjauan hukum dan resensi terkait).<sup>5</sup>

- Sumber-sumber Hukum Indonesia (UU ITE, UU TPKS, Peraturan OJK).<sup>17</sup>
- Sumber-sumber Teologi Digital (Dorobantu, S. *Imago Dei in the Age of Artificial Intelligence*).<sup>28</sup>

### **Karya yang dikutip**

1. 2 Desember Diperingati Sebagai Hari Apa Saja? Cek Lengkapnya di Sini, diakses Desember 2, 2025, <https://beritanasional.com/detail/122394/2-desember-diperingati-sebagai-hari-apa-saja-cek-lengkapnya-di-sini>
2. Hari Penghapusan Perbudakan Internasional: Fakta, Sejarah, dan Makna Peringatannya, diakses Desember 2, 2025, <https://beritanasional.com/detail/122465/hari-penghapusan-perbudakan-internasional-fakta-sejarah-dan-makna-peringatannya>
3. Laporan Amnesty Ungkap Perdagangan Manusia, Perbudakan dan Penyiksaan Ribuan Pencari Kerja termasuk WNI di Kompleks Penipuan Online di Kamboja, diakses Desember 2, 2025, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/laporan-amnesty-ungkap-perdagangan-manusia-perbudakan-dan-penyiksaan-ribuan-pencari-kerja-termasuk-wni-di-kompleks-penipuan-online-di-kamboja/06/2025/>
4. Hundreds of thousands trafficked into online criminality across SE Asia - UN News, diakses Desember 2, 2025, <https://news.un.org/en/story/2023/08/1140187>
5. BOOK REVIEW ECONOMIES OF

SURVEILLANCE - Stanford Law ..., diakses Desember 2, 2025, [https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2020/02/1280-1336\\_Online.pdf](https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2020/02/1280-1336_Online.pdf)

6. Kenali Dunia Siber, Waspada! Kejahatannya! (Bagian I) - Website DJKN, diakses Desember 2, 2025, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15712/Kenali-Dunia-Siber-Waspada!-Kejahatannya-Bagian-I.html>
7. Apa Itu CyberSpace? Karakteristik dan Contohnya - ITBOX, diakses Desember 2, 2025, <https://itbox.id/blog/apa-itu-cyberspace-karakteristik-dan-contohnya>
8. Perbandingan Hukum Pidana Cyber Crime dan Pengaruhnya dalam Penegakan Hukum antara indonesia dan amerika Comparison of Cyber Cri, diakses Desember 2, 2025, <https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/download/202/143/705>
9. TEKNOLOGI YANG MEMBEBASKAN: TEOLOGI PEMBEBASAN YANG DIKEMBANGKAN MELALUI JARINGAN DIGITAL PADA MASYARAKAT JEJARING SERTA KEHIDUPAN MENGGEREJA MASA KINI - Repositori UKDW, diakses Desember 2, 2025, <https://repository.ukdw.ac.id/113/>
10. The Internet of Things (IoT): Teknologi sebagai Pembebas atau Perbudakan | BWCF, diakses Desember 2, 2025, <https://borobudurwriters.id/kolom/the-internet-of-things-iot-teknologi-sebagai-pembembas-atau-perbudakan/>



11. Mendiskusikan “Netralitas” Teknologi - bincang media - WordPress.com, diakses Desember 2, 2025,  
<https://bincangmedia.wordpress.com/2011/10/06/mendiskusikan-%E2%80%9Cnetralitas%E2%80%9D-teknologi/>
12. Analisis: Bagaimana Hype AI Memperdalam Eksploitasi Tenaga Kerja atas Nama 'Efisiensi', diakses Desember 2, 2025,  
<https://pulitzercenter.org/id/stories/analisis-bagaimana-hype-ai-memperdalam-eksploitasi-tenaga-kerja-atas-nama-efisiensi>
13. Studi Literatur: Analisis Pengaruh Ragam Karakteristik Pekerja Ekonomi Gig terhadap Perekonomian Nasional, diakses Desember 2, 2025,  
<https://economics.pubmedia.id/index.php/jred/article/download/337/272>
14. Sisi Gelap Pekerja Gig Economy Indonesia: Disebut 'Mitra' Tapi Tak Ada Payung Hukumnya, diakses Desember 2, 2025,  
<https://www.vice.com/id/article/mitra-ojol-dan-kurir-tak-punya-payung-hukum-tak-terlindungi-hak-bpjs-upah-minimum-imbis-gig-economy/>
15. Online Sexual Exploitation of Children | International Justice Mission, diakses Desember 2, 2025, <https://www.ijm.org/our-work/trafficking-slavery/online-sexual-exploitation-children>
16. Colombia: Labor Violations, Sexual Exploitation in Webcam Studios, diakses Desember 2, 2025,  
<https://humantraffickingsearch.org/resource/colombia-labor-violations-sexual-exploitation-in->

[webcam-studios/](#)

17. Sextortion: A form of online sexual violence that has many victims, but weak legal protections - IJRS, diakses Desember 2, 2025,  
<https://ijrs.or.id/en/2023/12/01/sextortion-a-form-of-online-sexual-violence-that-has-many-victims-but-weak-legal-protections/>
18. Sextortion, Tindak Pidana Korupsi, serta Peluang Pengaturannya di Indonesia, diakses Desember 2, 2025,  
[https://ti.or.id/publikasi/sextortion/ID\\_briefing\\_paper\\_sextortion.pdf](https://ti.or.id/publikasi/sextortion/ID_briefing_paper_sextortion.pdf)
19. Kekerasan dan Pemasaran Perempuan Pekerja Seks ... - Jurnal UISU, diakses Desember 2, 2025,  
<https://ojs23.uisu.ac.id/index.php/mkd/article/download/10546/7487>
20. MESIN-MESIN PEMBUNUH PENDIDIKAN, diakses Desember 2, 2025,  
<https://jurnalonline.unsoed.ac.id/index.php/jis/issue/download/213/Volume%203%2C%20Issue%2012%2C%20Desember%202019>
21. (PDF) Review of Zuboff's The Age of Surveillance Capitalism - ResearchGate, diakses Desember 2, 2025,  
[https://www.researchgate.net/publication/332116119\\_Review\\_of\\_Zuboff's\\_The\\_Age\\_of\\_Surveillance\\_Capitalism](https://www.researchgate.net/publication/332116119_Review_of_Zuboff's_The_Age_of_Surveillance_Capitalism)
22. Rudy C Tarumingkeng: Geopolitik Dan Ekonomi Global ... - rudyct.com, diakses Desember 2, 2025,  
<https://rudyct.com/ab/Geopolitik.Dan.Ekonomi.Global-Indonesia.Dalam.Pusaran.Amerika%E2%80%93T>

[iongkok.pdf](#)

23. Interdisipliner Melawan Cybercrime Peran Psikologi hingga Ilmu Politik - SiberMate, diakses Desember 2, 2025, <https://sibermate.com/hrmi/interdisipliner-melawan-cybercrime-peran-psikologi-hingga-ilmu-politik>
24. Cyberstalking: Karakteristik Utama dan Dampaknya - ASDF.ID, diakses Desember 2, 2025, <https://www.asdf.id/apa-itu-cyberstalking/>
25. Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah atau Musibah - Djkn.kemenkeu.go.id, diakses Desember 2, 2025, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html>
26. Menavigasi Dunia Pinjaman Online: Solusi atau Jebakan? - BEM FEB Unair, diakses Desember 2, 2025, <https://bem.feb.unair.ac.id/kajian-kastrat/105>
27. Tantangan Keamanan Siber dan Implikasinya terhadap Hukum Kenegaraan: Tinjauan atas Peran Negara dalam Menjamin Ketahanan Digital - e-journal UIN Suka., diakses Desember 2, 2025, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/download/3980/2314/11867>
28. The Imago Dei in the Age of AI - Insights Magazine, diakses Desember 2, 2025, <https://www.insights.uca.org.au/the-imago-dei-in-the-age-of-ai/>
29. Imago Dei di Era Artificial Intelligence - DOREA:

Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani, diakses Desember 2, 2025,  
<https://ojs.sttcianjur.ac.id/index.php/dorea/article/view/80>

30. Implikasi Kemerdekaan dalam Roh terhadap Kebebasan Asasi Kristiani di Era Digital, diakses Desember 2, 2025,  
[https://www.researchgate.net/publication/375202994 Implikasi Kemerdekaan dalam Roh terhadap Kebebasan Asasi Kristiani di Era Digital/download](https://www.researchgate.net/publication/375202994_Implikasi_Kemerdekaan_dalam_Roh_terhadap_Kebebasan_Asasi_Kristiani_di_Era_Digital/download)
31. MENGGALI MAKNA KEMERDEKAAN SEJATI - UIN Alauddin Makassar, diakses Desember 2, 2025, <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/menggali-makna-kemerdekaan-sejati-0824>
32. (PDF) Mengimplementasikan Prinsip Moral di Era Digital - ResearchGate, diakses Desember 2, 2025, [https://www.researchgate.net/publication/396411213 Mengimplementasikan Prinsip Moral di Era Digital](https://www.researchgate.net/publication/396411213_Mengimplementasikan_Prinsip_Moral_di_Era_Digital)
33. Global Code of Conduct untuk Developer Teknologi, diakses Desember 2, 2025, <https://visiglobal.org/global-code-of-conduct-untuk-developer-teknologi/>
34. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Prosedur Standar Operasional Penyedia, diakses Desember 2, 2025, <https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/628/download>
35. Meningkatkan Akses Keadilan bagi Korban

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Melalui Implementasi UU TPKS - LBH APIK Jakarta, diakses Desember 2, 2025,  
<https://www.lbhapik.org/tulisan-detail/113>

36. Panduan Perlindungan Digital untuk Aktivis (versi 2021).pdf, diakses Desember 2, 2025,  
<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Panduan%20Perlindungan%20Digital%20untuk%20Aktivis%20%28versi%202021%29.pdf>
37. PANDUAN KEAMANAN DIGITAL PEMBUAT KONTEN - Aliansi Jurnalis Independen | AJI, diakses Desember 2, 2025,  
<https://aji.or.id/system/files/2025-02/panduan-keamanan-digital-pembuat-kontenpdffinal.pdf>
38. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), diakses Desember 2, 2025,  
<https://www.lpsk.go.id/beranda>
39. IOM Indonesia Mendukung Pemulangan Korban Perdagangan Orang di Sektor Online Scam | Perserikatan Bangsa, diakses Desember 2, 2025,  
<https://indonesia.un.org/id/291127-iom-indonesia-mendukung-pemulangan-korban-perdagangan-orang-di-sektor-online-scam>

## Profil Singkat Penulis

### Dr. Dharma Leksana, M.Th., M.Si.

Teolog | Wartawan Senior | Pegiat Media Digital Gerejawi



**Dr. Dharma Leksana, M.Th., M.Si.**, adalah teolog, wartawan senior, dan pendiri Perkumpulan Wartawan Gereja Indonesia (PWGI). Ia menempuh studi teologi di Universitas Kristen Duta Wacana, melanjutkan Magister Ilmu

Sosial dengan fokus media dan masyarakat, serta meraih Magister Theologi melalui kajian *Teologi Digital*. Gelar doktoralnya diperoleh di STT Dian Harapan dengan predikat *Cum Laude* lewat disertasi *Algorithmic Theology: A Conceptual Map of Faith in the Digital Age*.

Sebagai penulis produktif, ia telah menerbitkan ratusan buku akademik, populer, dan sastra, di antaranya *Teologi Algoritma: Peta Konseptual Iman di Era Digital* dan *Membangun Kerajaan Allah di Era Digital*. Kiprahnya menjembatani dunia teologi, media digital, dan transformasi

## **Direktur Utama PT Dharma Leksana Media Group**

**Dr. Dharma Leksana, S.Th., M.Si.** adalah pendiri dan Direktur Utama dari **PT Dharma Leksana Media Group**, sebuah perusahaan media yang berbasis di Jakarta Pusat. Perusahaan ini menaungi sekitar 58 media online yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Media-media tersebut mencakup portal berita nasional hingga lokal, serta memiliki fokus khusus pada pemberitaan keagamaan, sosial, dan budaya. ([jabarindo.com](http://jabarindo.com))

## **Peran dalam Organisasi Media dan Keagamaan**

Selain peranannya di perusahaan media, Dharma Leksana juga aktif dalam organisasi keagamaan dan media. Ia menjabat sebagai **Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Gereja Indonesia (PWGI)**, sebuah organisasi yang berfokus pada pemberitaan gereja di era digital. Dalam kapasitas ini, ia berkontribusi dalam mengembangkan jurnalisme digital yang beretika dan informatif. ([bicaranusantara.com](http://bicaranusantara.com))

## **Karya Tulis dan Buku**

Dharma Leksana juga dikenal sebagai penulis yang produktif. Beberapa bukunya yang telah diterbitkan antara lain:

- **"Panduan Menulis Berita di Media Online: Jurnalisme Digital"**
- **"Menulis Berita Sesuai Kaidah Jurnalistik"**
- **"Homiletika di Era Digital"**([detik-news.com](https://detik-news.com), [JABARKU KEREN](https://jabarkukeren.com))

Buku-buku tersebut memberikan panduan praktis bagi para jurnalis dan pewarta gereja dalam menghadapi tantangan jurnalisme di era digital. ([bicaranusantara.com](https://bicaranusantara.com))

### **Kegiatan dan Dukungan dalam Acara Keagamaan**

Sebagai Ketua Umum PWGI, Dharma Leksana turut mendukung dan menyukseskan berbagai acara keagamaan, seperti **Sidang Raya XVIII Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI)** pada tahun 2024. Ia aktif dalam memfasilitasi komunikasi dan informasi terkait acara tersebut melalui media yang dikelolanya. ([YouTube](https://www.youtube.com))

### **Komitmen terhadap Pluralisme dan Kedamaian**

Dharma Leksana juga dikenal atas komitmennya terhadap pluralisme dan kedamaian. Dalam berbagai kesempatan, ia mengajak masyarakat untuk saling menghormati dan



menjaga kedamaian, terutama dalam konteks keberagaman Indonesia. Misalnya, dalam menyambut bulan Ramadan, ia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan mengajak umat untuk menjaga kedamaian dan ketentraman bersama. ([jabarindo.com](http://jabarindo.com), [jabarindo.com](http://jabarindo.com))

## **Karya Tulis Dharma Leksana**

### **1. Buku "Homiletika di Era Digital" (2025)**

Buku ini menyajikan pendekatan kontemporer dalam menyampaikan Firman Tuhan melalui media digital. Penulis menyoroti pergeseran homiletika dari mimbar fisik menuju ruang digital sebagai suatu transformasi teologis dan kultural yang tidak terhindarkan di abad ke-21. Dengan menggabungkan riset ilmiah, refleksi teologis, dan strategi komunikasi modern, buku ini memandu para pendeta agar mampu hadir secara otentik, relevan, dan etis di tengah ekosistem media sosial dan platform digital seperti YouTube, TikTok, podcast, dan Instagram

## **2. Buku "Panduan Menulis Berita di Media Online"**

Buku ini merupakan panduan praktis bagi para jurnalis dan pewarta gereja dalam menghadapi tantangan jurnalisme di era digital. Buku ini menyediakan panduan praktis, menyajikan teknik menulis yang efektif, strategi SEO, penggunaan multimedia, etika jurnalistik, hingga penyuntingan yang baik .

## **Kontribusi dalam Media dan Keagamaan**

### **1. Pendiri dan Direktur Utama PT Dharma Leksana Media Group**

Dharma Leksana adalah pendiri dan Direktur Utama dari PT Dharma Leksana Media Group, sebuah perusahaan media yang berbasis di Jakarta Pusat. Perusahaan ini menaungi sekitar 58 media online yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Media-media tersebut mencakup portal berita nasional hingga lokal, serta memiliki fokus

husus pada pemberitaan keagamaan, sosial, dan budaya.

2. **Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Gereja Indonesia (PWGI)**, Selain peranannya di perusahaan media, Dharma Leksana juga aktif dalam organisasi keagamaan dan media. Ia menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Gereja Indonesia (PWGI), sebuah organisasi yang berfokus pada pemberitaan gereja di era digital. Dalam kapasitas ini, ia berkontribusi dalam mengembangkan jurnalisme digital yang beretika dan informatif.
3. **Partisipasi dalam Acara Keagamaan**  
Sebagai Ketua Umum PWGI, Dharma Leksana turut mendukung dan menyukseskan berbagai acara keagamaan, seperti Sidang Raya XVIII Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) pada tahun 2024. Ia aktif dalam memfasilitasi komunikasi dan informasi terkait acara tersebut melalui media yang dikelolanya.

